



## Determinisme Teologi Islam dalam Pola Gerak Sejarah Indonesia

Muhammad Nasir<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

\*muhammadnasir@uinib.ac.id

Dikirim: 08-01-2023; Direvisi: 11-05-2024; Diterima: 14-05-2024; Diterbitkan: 31-08-2024

**Abstrak:** Artikel ini membahas determinisme teologi Islam dalam membentuk hukum dan pola gerakan sejarah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana agama-agama di Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk tindakan individu dan kelompok, serta menentukan pola pergerakan sejarah Indonesia modern. Diskusi ini menggunakan konsep filosofi historis spekulatif determinisme historis. Sebagai kesimpulan, kekuatan pendorong historis Indonesia dipengaruhi oleh ide-ide teologis agama-agama di Indonesia, termasuk Islam yang tercermin dalam perumusan periodisasi sejarah Indonesia yang didasarkan pada periodisasi sejarah Indonesia, yang dibangun berdasarkan entitas kekuasaan yang ditandai oleh agama dan identitas para penguasa yang terkait dengan agama tertentu. Selain itu, pengaruhnya juga dapat dibaca dengan gaya historiografi yang dikembangkan di Indonesia yang terkait dengan urusan agama.

**Kata Kunci:** determinisme historis; determinisme teologis; filsafat sejarah; historiografi; pola gerakan historis

**Abstract:** This article discusses the determinism of Islamic theology in shaping the laws and movement patterns of Indonesian history. The aim is to explore how religions in Indonesia play a central role in shaping individual and group actions, as well as determining the movement patterns of modern Indonesian history. This discussion uses the speculative historical philosophy concept of historical determinism. In conclusion, the Indonesia historical driving force or its historical pattern are influenced by the theological ideas of religions in Indonesia, including Islam. This is reflected in the formulation of periodization of Indonesian history which is based on the periodization of Indonesian history, which is built on the basis of power entities characterized by religion and the identity of its rulers which is related to a particular religion. Apart from that, its influence can also be read in the style of historiography that developed in Indonesia which is related to religious affairs.

**Keywords:** historical determinism; historical motion patterns; historical philosophy; historiography; theological determinism



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Pendahuluan

Pepatah latin “suara rakyat adalah suara tuhan” (*Vox populi vox Dei*) yang populer dalam dunia demokrasi (Merriam-Webster, 2023) terlihat kontras dengan ungkapan “jangan bawa-bawa tuhan dalam urusan negara”. Beberapa contoh ungkapan yang dapat dikemukakan, misalnya “berpolitik jangan bawa agama” (Humaidi, 2018), atau ungkapan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI “Saran saya jangan agama dibawa ke politik. Karena kalau agama

dibawa-bawa ke politik kasihan umat ini mau ke mana nanti” (Haq, 2018). Begitu juga ungkapan Erman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 2005-2009 yang mengatakan “Jangan Libatkan Agama dalam Urusan Politik” (Siregar, 2023). Ungkapan tersebut juga terkesan kontradiksi dengan narasi alinea ke-3 teks Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 itu tertulis pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (Indonesia, 2020). Kalimat tersebut berisi pernyataan dan pengakuan akan adanya faktor tuhan dan usaha manusia Indonesia dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah Indonesia modern, alinea ke-3 itu menjadi landasan normatif dan landasan filosofis, sekaligus -dalam diksi Bung Hatta- ‘menjadi fundament politik dan fundament moral (etik agama)’, sebagai titik permulaan sejarah kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bagi masyarakat Indonesia (Hatta, 1977).

Alinea ke-3 pembukaan UUD 1945 di atas menurut Mahfud MD mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan melembagakan keimanan dalam bentuk agama-agama yang diakui keberadaannya oleh negara (ugm.ac.id, 2018). Hal ini dapat dijadikan titik tolak diskusi pada artikel ini tentang kehadiran aliran determinisme, terutama determinisme teologis dalam proses sejarah Indonesia. Jika merujuk kepada profil penduduk Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 237,56 juta dan terbesar pula di dalam negeri Indonesia dengan persentase mencapai angka 86,7 persen dari total penduduk Indonesia (Rizaty, 2022). Realitas bahwa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia merupakan indikasi konkrit bahwa Islam sebagai ajaran telah berhasil merasuk dalam bangunan peradaban bangsa Indonesia (Zuhri, 2021), dan pemikiran tentang pola dan arah gerak sejarah Indonesia merupakan cerminan dari ekspresi teologis masyarakat muslim Indonesia itu sendiri.

Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 itu dapat dikaitkan dengan salah satu tema kajian filsafat sejarah, yaitu tentang faktor penentu sejarah (*historical determinism*) yang di antaranya membahas tentang kekuatan penggerak sejarah dan pola gerak sejarah. Dalam kajian filsafat sejarah, ada dua macam model gerak sejarah, yaitu konsep gerak sejarah sebagai pola hukum determinisme; dan kedua konsep gerak sejarah dalam kacamata ilmiah (indeterministik) yang melihat gerak sejarah dalam batas skema bertingkat-tingkat sejajar dengan pola irama waktu. Secara konseptual determinisme sejarah berakar pada aliran filsafat sejarah spekulatif. Menurut aliran ini, pembahasan sejarah berkisar sekitar empat topik, yaitu konsepsi tentang manusia sebagai makhluk sejarah (*homohistoricus*), kekuatan penggerak (*driving force*), pola gerak sejarah dan tujuan atau makna sejarah (Zed, 2018).

Gerak sejarah sebagaimana dipahami filsuf sejarah, baik dari aspek penggerak dan pola gerak merupakan merupakan suatu hasil perenungan falsafati tentang tabiat atau sifat-sifat gerak sejarah, sehingga diketahui struktur tetap (immanent) dalam proses gerak sejarah secara keseluruhan. Di sini berlaku hukum determinisme sejarah yang bertujuan mencari sebab-sebab

mutlak atau sebab yang pasti (deterministik) yang bersifat tunggal. Di sinilah berlaku hukum determinisme sejarah.

Sebagai pembuka wacana, konsep determinisme teologis dalam filsafat sejarah adalah pandangan bahwa perkembangan sejarah manusia atau peristiwa-peristiwa sejarah tergantung pada kehendak atau rencana Allah atau entitas ilahi lainnya. Ini adalah konsep yang sering muncul dalam kerangka pemikiran agama, terutama dalam agama-agama monotheistik seperti agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Determinisme teologis mengandaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah adalah bagian dari rencana ilahi atau kehendak Tuhan. Aspek penting dari determinisme teologis dalam filsafat sejarah dapat dibaca dalam karya Ellen G. White, di antaranya; 1) keberadaan Tuhan atau entitas ilahi yang diyakini memiliki kekuasaan dan kontrol penuh atas alam semesta, termasuk perjalanan sejarah; 2) adanya rencana ilahi atau maksud Tuhan dalam menciptakan dunia dan mengarahkan peristiwa sejarah; 3) adanya konsep predeterminasi yaitu ide bahwa segala sesuatu telah ditentukan sejak awal oleh Tuhan; 4) adanya peran manusia sebagai agen moral yang memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi tindakan mereka masih dapat diarahkan oleh kehendak ilahi; 5) pemahaman dan makna sejarah pada peristiwa sejarah yang diinterpretasikan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar dan memiliki tujuan moral atau rohani; 6) adanya konsekuensi moral atau pelajaran yang harus dipetik manusia yang digunakan untuk mengarahkan perilaku manusia menuju keselamatan atau pemahaman spiritual (1917).

Pandangan ini sering menjadi subjek diskusi dan perdebatan dalam filsafat sejarah dan teologi, karena beberapa orang melihatnya sebagai penyederhanaan peristiwa sejarah yang kompleks dan sering kali penuh dengan konteks budaya dan sosial. Beberapa filsuf sejarah dan teolog mungkin memilih untuk menggabungkan elemen-elemen determinisme teologis dengan elemen-elemen lain, seperti kebebasan manusia atau pengaruh sosial, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sejarah. Istilah determinisme teologis dapat digunakan, sebagai penjelasan atas keyakinan atau tindakan masyarakat yang berpikir tanggung jawab kausalitas hidupnya berada dalam pergerakan dunia yang terdeterminasi oleh kehendak Tuhan (Wikranta & Jaya, 2023).

Oleh sebab itu, artikel ini membahas bagaimana hukum gerak sejarah determinisme dalam membentuk pola gerak sejarah Indonesia, dengan memberi penekanan pada masalah determinisme teologis Islam sebagai pembatasan studi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana agama Islam di Indonesia memainkan peran dalam membentuk tindakan individu dan kelompok, serta menentukan pola gerak sejarah Indonesia modern. Secara praktis artikel ini juga ditujukan untuk memberi respon akademik terhadap ungkapan yang dinilai *a-historis* atau terkesan mengingkari peran Tuhan atau agama sebagai penentu gerak sejarah Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang menggunakan metode sejarah dan melibatkan analisis sejarah dan analisis teologis. Analisis sejarah digunakan untuk menyelidiki peristiwa dan tindakan sejarah yang relevan dengan tema determinisme teologis di Indonesia. Sementara,

analisis teologis digunakan untuk memahami peran agama dan keyakinan keagamaan dalam proses sejarah Indonesia. Data historis dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku sejarah, arsip sejarah, catatan resmi, dan dokumentasi sejarah lainnya. Sedangkan data yang terkait dengan konsep teologis bersumber dari literatur agama dan pemikiran teologi para cendekiawan.

### **Determinisme Teologis dalam Filsafat Sejarah**

Sebagai kajian filsafat sejarah, artikel ini diawali dengan penjelasan terhadap 3 konsep, yaitu determinisme historis, determinisme teologis, dan kekuatan penggerak sejarah. Ketiga konsep ini akan menjadi bingkai kerja dalam menganalisis kehadiran paham determinisme teologis dalam proses dan penulisan sejarah Indonesia. Kerangka konseptual ini juga berfungsi untuk memberikan pemahaman dan sistematisasi terhadap konsep-konsep kunci yang terkait dengan tema tersebut. Penjelasan singkat terhadap ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut;

#### **Determinisme Historis**

Dalam studi filsafat sejarah, ada tiga jenis kajian yang populer, pertama, studi historiografi (*historiography*) yang berkisar sekitar sejarah penulisan sejarah, kedua filsafat sejarah kritis (*the critical philosophy of history*) yang membahas tentang metode yang digunakan sejarawan dalam menyelidiki peristiwa-peristiwa tertentu dan ketiga, filsafat sejarah spekulatif (*the speculative philosophy of history*) yang memandang proses sejarah secara menyeluruh dan kemudian menafsirkannya. Konsep determinis historis merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran aliran filsafat sejarah spekulatif.

Tokoh-tokoh filsafat sejarah spekulatif yang terkenal di antaranya adalah Giambattista Vico (1668-1774) yang menyatakan bahwa dunia fisik tidak dapat bergerak sendiri, tetapi Yang Tak Terbatas (*the infinite*) memberikan gerak (*conatus*) pada yang fisik (Bertland, 1994). Kemudian Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang menyatakan kemanusiaan merupakan bagian dari idea yang mutlak yaitu tuhan atau tuhan yang menjelma dalam alam sadar manusia (Suhartono, 2005). Selanjutnya ada Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) yang berpendapat agama (baca: tuhan) juga dianggap memberi pengaruh besar terhadap manusia. Toynbee juga menyatakan, adanya penjelmaan Tuhan di dalam diri manusia (Lauer, 1989).

Ada banyak filosof sejarah yang berada dalam aliran ini, tetapi contoh pemikiran ketiga tokoh di atas sudah dapat menggambarkan bagaimana aliran filsafat sejarah spekulatif menggunakan konsep determinisme sejarah untuk menelusuri penyebab terjadinya peristiwa sejarah, khususnya dalam meletakkan sesuatu yang metafisis (termasuk unsur teologi) di dalam proses sejarah.

#### **Determinisme Teologis**

Determinisme teologis adalah pandangan bahwa Tuhanlah yang menentukan setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia (Vicens, 2022). Determinisme teologis sering diasosiasikan dengan teologi Calvinis. Misalnya definisi yang ditulis oleh John Feinberg yang mengartikan determinasi teologis sebagai ketetapan Tuhan mencakup dan mengendalikan

segala sesuatu (Feinberg, 2001). Begitu juga pendapat Paul Helm, seorang determinis teologis lain dari aliran Calvinis, yang mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan adalah “diperluas” ke semua yang telah Dia ciptakan (Helm, 1993). Meskipun ada banyak perdebatan mengenai tokoh sejarah terkemuka yang merupakan pemikir determinis teologis, tetapi nama-nama seperti St. Augustine, Thomas Aquinas, John Calvin, dan Gottfried Leibniz adalah di antara para pemikir yang mendukung pandangan tersebut setidaknya pada titik-titik tertentu dalam karier mereka yang termasyhur.

### **Kekuatan Penggerak Sejarah (*Driving Force*) dan Pola Gerak Sejarah (*Historical Pattern*)**

Semestinya ini merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi dalam artikel ini akan dibahas dalam satu sub pembahasan. Tujuannya agar diperoleh satu pemahaman yang utuh dalam satu narasi agar gerak sejarah sebagaimana dipahami filsuf sejarah terkait dengan tabiat atau sifat-sifat gerak sejarah, sehingga diketahui struktur *immanent* (tetap) dalam proses gerak sejarah secara keseluruhan (Zed, 2018). Dalam filsafat sejarah, dikenal beberapa hukum gerak sejarah.

Pertama, gerak evolusionisme yang berakar dari teori evolusi Charles Darwin (1808-1882), yang kemudian dikembangkan oleh Haeckel (1859-1919) dan juga oleh Huxley (1825-1895) (Oldroyd, 1983). Teori ini kemudian melahirkan pola gerak sejarah garis lurus (*linear*) dan berorientasi kepada kemajuan (Maiwan, 2013). Gerak dan pola sejarah ini misalnya dapat dibaca melalui karya Muhamamd Yamin (1903-1962) berjudul 6000 Tahun Sang Merah Putih (Yamin, 2017). Dalam buku ini, Yamin telah memetakan bahwa persatuan nasionalisme Indonesia sudah ada semenjak 6000 tahun yang lalu, atau setidaknya sudah ada semenjak Sriwijaya dan Majapahit (Wood, 2013). Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dalam konteks ini merupakan sebuah kelanjutan (*progress*) gerak sejarah yang berjalan lurus sejak 6000 tahun yang lalu.

Kedua, hukum *fatum*, yang dalam bahasa Inggris sama dengan kata *doom, fate, and destiny* (azab, nasib, dan takdir). Menurut hukum ini, sejarah digerakkan oleh sesuatu yang di luar kekuatan dan kehendak manusia atau di luar kontrol (kendali) yang tidak bisa terelakan sehingga harus diterima sebagai kenyataan sekaligus keyakinan (Sahidin, 2019). Masyarakat Yunani kuno meyakini *fatum* sebagai kekuatan gaib yang menjadi pengendali keteraturan alam semesta (*cosmos*) dan tidak dapat dilawan (Hatta, 1986). Oleh sebab itu, dalam tradisi Yunani, hukum *fatum* menjadi awal bagi kemunculan filsafat determinisme. Hukum *fatum* kemudian melahirkan gerak sejarah siklus, yang didasarkan pada ilustrasi pola yang berlaku dalam hukum alam (Zed, 2018).

Ketiga, hukum sejarah dialektis yang dikembangkan dari filsafat Dialektika Friedrich Engels (1820-1895). Pada dasarnya, konsep dialektika Engel dibangun di atas tiga hukum, yaitu hukum perubahan (*transformasi*) kuantitas menjadi kualitas dan *vice versa*, hukum penafsiran mengenai yang berlawanan (*opposites*), dan hukum negasi dari negasi (Marxis.org, 2002). Pandangan dialektika ini dikembangkan oleh Hegel. Menurut Hegel dalam proses sejarah itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Hegel menyamakan kemajuan dalam proses sejarah dengan kemajuan pengetahuan manusia mengenai dunia (Collingwood, 1985). Hukum sejarah dialektis

melahirkan pola sejarah dialektis. Hukum sejarah dialektis di Indonesia tampak dari nalar yang terbangun dalam perdebatan *founding fathers* Indonesia tentang dasar negara dalam teks Piagam Jakarta (Saidi, 2007). Dalam perdebatan itu, dasar negara dalam teks Piagam Jakarta mengesankan adanya proses dialektika yang berakar dari sejarah Indonesia pra kemerdekaan, riwayat hukum, struktur sosial dan prospek masa depan Indonesia.

Keempat, teori orang besar yang dipopulerkan Thomas Carlyle pada tahun 1840-an. Carlyle menyebutnya dengan orang-orang hebat (*great men*), yang telah membentuk diri mereka dalam sejarah dunia, kemudian ide-ide, tindakan dan kinerja mereka menjadi referensi bagi manusia untuk melakukan tindakan sejarah (Carlyle, 1908). Semua hal yang terkait dengan orang besar ini kemudian membentuk pola konsepsi pemujaan pahlawan dan kepahlawanan dalam urusan manusia. Ringkasnya, sejarah dalam teori ini secara garis besar dapat dijelaskan sebagai dampak dari orang-orang besar, atau pahlawan; yaitu individu yang sangat berpengaruh, dan memiliki karisma personal, kecerdasan, hikmat, atau keterampilan politik (Hook, 1950). Dalam historiografi Indonesia, peran orang-orang besar dalam sejarah ditulis dalam narasi kisah-kisah heroisme dan bersifat politis (Mulyana, 2013), tidak sedikit mengeksplorasi kehidupan raja-raja dan memoles istananya secara monografis, terutama karya-karya yang terbit sebelum 1900-an (Abdullah, 1999). Sejarah seperti ini terasa kaku dan sangat elitis, yang dalam konteks ini disebut sebagai sejarah sakral (Kurniawan, Warto, & Sutimin, 2019).

Kelima, gerak sejarah spiral yang mengikut pola dasar lingkaran, tetapi dalam perjalanan berkembang keluar dari lingkaran sebelumnya (Zed, 2018). Spiral merupakan percampuran atau gabungan antara teori linier dan teori siklus. Sementara, Jones dalam (Evans, 2022) mendefinisikan siklus sebagai hubungan dinamis antara masa lalu dan masa kini dalam pola siklus. Teori ini selain berpatokan pada waktu *past-present-future*, tetapi juga berpatokan dengan roda nasib yang berputar (al-Sharqawi, 1981). Penjelasan sifat pengulangan ini dijelaskan oleh Braudel sebagai sifat sejarah yang dinamis dan selalu berubah, yang terus-menerus ditafsirkan dan dievaluasi kembali sebagai respons terhadap pertanyaan dan perspektif baru (Braudel, 2019). Gerak sejarah siklus ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah menjadi fakta mental dan fakta sosial. Hal ini bisa ditelusuri pada kalimat “sejarah pasti berulang”, atau “hidup seperti roda pedati,” yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam karya sastra. Sekadar contoh, dapat disimak pada lirik lagu Elly Kasim (Kasim, 2022).

Keenam, hukum probabilitas yang mendasarkan kajiannya pada teori ilmiah. Menurut hukum ini sejarah bisa dipelajari dan diprediksi secara ilmiah. Tokoh utama dalam garis ini adalah sejarawan Perancis Fernand Braudel (1902-1985). Menurut Braudel, sejarah bergerak menurut irama waktu yang dibaginya ke dalam tiga alur, gerak sejarah jangka pendek (*the courte durée*) yang biasanya berkenaan dengan sejarah politik atau Braudel menyebutnya *histoire événementielle* (sejarah peristiwa) yang cenderung mengalami perubahan atau berfluktuasi secara cepat; gerak sejarah jangka menengah (*moyenne durée*), biasanya berkaitan dengan sejarah sosial-ekonomi, disebut *histoire conjuncturelle*, rangkaian kejadian dengan kecepatan sedang dan gerak sejarah jangka panjang (*longue durée*) yaitu kejadian sejarah yang

bergerak sangat lambat laun, yang berlangsung lama di atas seratus tahun dan bahkan bisa *millennium* (Schloen, 2009). Braudel menyebutnya *histoire structurelle* (sejarah struktural).

## **Determinasi Teologi Islam dalam Sejarah Indonesia**

### **Nalar Teologi Sejarah Indonesia**

Bangsa Indonesia sepertinya memiliki hubungan yang unik dengan agama. Meskipun bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi dalam rekaman sejarahnya semenjak era kerajaan-kerajaan masa lampau hingga zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agama menjadi faktor yang menentukan dalam pembentukan narasi sejarah (historiografi) Indonesia. Hal ini bisa dikonfirmasi pada dua masalah. Pertama, perumusan periodisasi sejarah Indonesia. Kedua, pada corak historiografi yang berkembang di Indonesia.

Pada periodisasi sejarah Indonesia, ditemukan periode sejarah yang disusun oleh sejarawan berdasarkan kecenderungan keagamaan yang tercermin dalam penggunaan istilah “zaman Hindu-Budha atau “zaman kerajaan-kerajaan Islam.” Sebagai contoh, Van Deventer dalam *Geschiedenis der Nederlaner Op Java* menulis pembabakan sejarah Indonesia dengan menggunakan istilah (1) Zaman Hindu, (2) Zaman Tersiarnya Islam, (3) Zaman Portugis, (4) Zaman Kekuasaan VOC (Deventer, 1886-1887). Kemudian F.W. Stapel menulis periodisasi dengan menggunakan istilah (1) Zaman Hindu, (2) Penyiaran Agama Islam; Portugis di Hindia Timur, (3) Zaman VOC, (4) Zaman peralihan; Republik Batavia, Daendels, masa kekuasaan Inggris dan (5) Zaman Pemerintah Nederland (Ali, 2005). Historiografi modern Indonesia yang tertulis dalam Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang terdiri atas enam jilid dan mencakup rentang waktu periode Pra-Sejarah sampai periode Sejarah Kontemporer juga memuat periodisasi berdasarkan agama, terutama saat menuliskan permulaan sejarah tradisional Indonesia yang disebut dengan Zaman Jawa Kuna (tertulis pada Jilid II) yang dijelaskan sebagai Indonesia Hindu dan Zaman pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (lihat Jilid III) sebagai fase-fase yang disusun berdasarkan entitas kekuasaan bercirikan agama (Susanto, 1984)

Meskipun periodisasi menurut kategori zaman (temporal) ini menyebutkan entitas agama, namun belum tentu berisi tentang sejarah perkembangan pemahaman dan ajaran keagamaan. Tetapi dalam narasi yang tersedia dalam teks yang berkaitan dengan periodisasi tersebut dapat dengan mudah ditemukan peristilahan (*mushtalahat*) yang terkait dengan terma-terma agama. Terutama dalam bentuk narasi proses terbentuknya kerajaan, perubahan gelar raja-raja, masa pengakhiran (dibahasakan dengan “takdir”) serta keterlibatan pemikiran mahdiisme, mesianisme atau ratu adil sebagai kekutan penggerak sejarah.

Dalam sejarah penulisan sejarah (historiografi) Indonesia terdapat empat corak historiografi yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional dan historiografi modern (Iryana, 2017). Cerita sejarah pada historiografi tradisional selalu berpusat pada kekuatan gaib, bukan hanya ditentukan oleh aksi atau di motivasi manusia. Dominasi kekuatan gaib digambarkan begitu menonjol di luar diri manusia. Pola cerita seperti itu disebut sebagai mitos atau cerita kepercayaan (Abdullah, 1996). Oleh sebab itu, dalam historiografi tradisional yang termuat dalam babad, tambo, hikayat, silsilah, lontara dan sebagainya, peristiwa-peristiwa sejarah diceritakan dalam bentuk simbolik. Fungsi sejarah pada

historiografi tradisional lebih terkesan sebagai pemantapan nilai dan tata atau makna simbolik dari pandangan masyarakat (Abdullah, 1996). Pada historiografi tradisional ini terlihat jelas bahwa faktor keyakinan dan agama cukup menentukan dalam narasi sejarah.

Pada historiografi kolonial, fokusnya lebih mengedepankan aspek politis, ekonomis dan institusional dan tentu saja ditulis untuk kepentingan kolonial. Hubungan kolonial dengan masyarakat Indonesia diletakkan dalam narasi kuasa pemerintah (kolonial) dan rakyat jajahan. Namun, jejak agama dan kepercayaan bukannya tidak tampak, tetapi justru terlihat dari kebijakan pemerintah kolonial, misalnya kolonial Belanda. Pemerintah Belanda melihat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para ulama, misionaris, dan pendeta terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan sebagai penghalang bagi kepentingan perdagangan dan kekuasaan pemerintah Belanda. Bahkan dalam taraf tertentu dapat dianggap sebagai kekuatan penggerak (*driving force*) bagi perlawanan terhadap pemerintah Belanda.

Selanjutnya, pada historiografi nasional Indonesia ditulis dengan spirit perlawanan yang berangkat dari kesadaran kritis dan kesadaran akan perlunya penulisan sejarah Indonesia. Karya-karya sejarah dalam corak historiografi tradisional ini lebih kuat mencirikan sebagai sejarah ideologis. Sejarah ideologis adalah sejarah yang menanamkan nilai dan semangat nasionalisme, heroisme, dan patriotisme. Agama dan keyakinan juga dapat dilihat dari latar belakang ideologi dan spirit keagamaan para aktor yang diceritakan dalam sejarah nasional Indonesia.

Terakhir, corak historiografi modern menghadirkan berbagai jenis karya sejarah dari berbagai perspektif yang beragam. Karya-karya sejarah yang ditulis lebih tampak sebagai sebuah karya akademis yang menggunakan teori dan pendekatan-pendekatan yang lazim dalam ilmu sejarah. Sutherland menyebutnya dengan istilah *modern professional history* (Sutherland, 2008). Tema-tema keagamaan, meskipun bukan yang utama, tetapi mendapat ruang pembahasan yang cukup dalam historiografi Indonesia modern. Terkhusus bila penelusuran diawali dari proses pedebatan para *founding fathers* Indonesia di masa awal berdirinya Republik Indonesia tentang relasi agama dan negara, hingga isu-isu terkini tentang pergulatan agama dalam kehidupan negara dewasa ini.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejarah Indonesia telah menempatkan urusan agama sebagai faktor penentu (*determinant*). Bahkan dalam konteks saat ini, Indonesia menjadikan agama sebagai salah satu dasar negara sebagaimana tertulis dengan tegas pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, Indonesia tidak menjadi sebuah negara agama meskipun berdasarkan konstitusi, Indonesia mengakui berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konfusianisme, dan aliran kepercayaan sebagai keyakinan lokal.

Jika diurut jauh ke belakang, sejarah Indonesia di masa kerajaan-kerajaan masa lampau juga tidak lepas dari nuansa teologis. Misalnya, sejak kehadiran agama Hindu ke nusantara pada awal abad ke-2, memberi pengaruh kepada kerajaan-kerajaan yang kemudian disebut kerajaan bercorak hindu. Misalnya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singasari dan Majapahit. Para raja di kerajaan-kerajaan tersebut menjadikan agama Hindu sebagai sebuah aset untuk kekuasaan mereka sehingga mereka mulai merepresentasikan diri mereka sebagai dewa-dewi



Hindu. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan arca-arca yang merepresentasikan dewa-dewi dalam keyakinan Hindu di nusantara (Ferdinandus, 1995).

Hal yang sama juga dapat dilihat dari peninggalan kerajaan-kerajaan berciri Budha. Misalnya Candi Borobudur telah menjadi simbol kebesaran para pendirinya, yaitu raja-raja Syailendra (775-850 M) yang menganut paham Budha Mahayana (Joesoef, 2004). Candi Borobudur memperlihatkan sebuah komposisi arsitektural yang terpahat secara beragam dan terperinci, yang sarat dengan simbolisasi yang bernuasa Budha. Fenomena seperti ini berlanjut pada proses politik kekuasaan dalam wawasan mistik agama Jawa.

Agama Jawa memuat wawasan historis yang terejawantah dalam mistik kejawen. Hal itu sudah berlangsung sejak zaman Hindu Budha dan berpengaruh kepada filsafat bernegara yang meyakini adanya kehidupan yang kekal setelah mati. Oleh sebab itu, tujuan bernegara dalam tradisi Jawa bukan semata mencapai kemakmuran di dunia nyata, tetapi justru pada kehidupan setelah mati. Dalam cerita sejarah kemunculan kerajaan-kerajaan di Jawa diyakini adanya kekuatan sakti yang ikut membantu terbentuknya kerajaan. Tidak mengherankan bila raja-raja Jawa di masa lalu hampir selalu menjapalkan lelatu mistik, misalnya bertapa untuk mendapatkan kekuatan (Endraswara, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berabad-abad yang lampau, masyarakat nusantara sudah meyakini adanya keterlibatan tuhan, dewa-dewi dalam urusan politik dan kenegaraan mereka. Demikian juga bahwa faktor-faktor teologis begitu kuat dalam menentukan hukum dan gerak sejarah masyarakat atau kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Budha, hingga berlanjut kepada kerajaan-kerajaan bercorak Islam.

Meskipun pada dasarnya Islam di kerajaan-kerajaan nusantara tidak mengesankan adanya negara agama, dalam arti negara dikuasai oleh doktrin-doktrin agama. Bahkan sepertinya lebih didominasi oleh warisan sistem sosial politik pra-Islam. Sebagai contoh, studi Suwarno (1990), mengidentifikasi birokrasi pemerintahan Kerajaan Mataram Islam justru mengarah ke pola birokrasi pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berpusat pada raja sebagai dewa-raja. Penerimaan atas sistem pemerintahan Islam baru tampak pada perubahan gelar raja dari Prabu, Panembahan, Susuhunan atau Raja menjadi Sultan.

Uraian di atas menggambarkan adanya nalar determinisme teologis dalam hukum dan gerak sejarah yang dibangun di atas dasar hubungan sakral antara tuhan dan manusia. Hubungan tuhan dan manusia kemudian digambarkan dalam berbagai bentuk, di antaranya relasi tuhan sebagai pencipta, yang menguasai dan yang mengendalikan kehidupan makhluk manusia sepanjang sejarahnya.

Dalam konteks Indonesia modern, dapat dikemukakan beberapa bukti yang mendukung adanya determinisme teologis dalam gerak sejarah Indonesia. Di antaranya, *pertama*, kehadiran simbol-simbol keagamaan seperti masjid, gereja, candi, dan kuil Hindu di berbagai tempat di Indonesia. Simbol-simbol ini seringkali menjadi bagian integral dalam sejarah dan budaya Indonesia, dan mencerminkan pengaruh agama dalam pembentukan peradaban dan sejarah Indonesia. Kedua, kepercayaan dan tradisi keagamaan yang diakomodir sebagai perayaan atau hari libur nasional, seperti seperti perayaan Idul Fitri bagi umat Islam atau perayaan Nyepi (Tahun Baru Saka) di Bali yang dijadikan bagian dari kalender budaya Indonesia.

Masalah pertama yang muncul dalam sejarah Islam sepeninggal Nabi Muhammad bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah politik. Namun, persoalan politik ini pada akhirnya menjelma menjadi persoalan teologis (Nasution H. , 1985). Di Indonesia, perdebatan teologis juga muncul bersamaan dengan pembahasan politik tentang dasar negara di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 dan di sidang-sidang konstituante setelah pemilihan umum tahun 1955 (Maarif, 2017). Pada umumnya para politisi partai Islam sejak BPUPKI hingga sidang Konstituante berpendapat bahwa Islam mesti dijadikan dasar negara, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam. Tetapi di kalangan politisi Islam itu juga terjadi perdebatan yang berangkat dari perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana menghadirkan Islam dalam dasar negara (Dengel, 2011).

Perdebatan mengenai dasar negara di Konstituante semakin menegaskan adanya perbedaan pandangan sikap yang konfrontatif di antara pendukung ideologi-ideologi yang berbeda (Nasution A. B., 1995). Sidang konstituante itu sendiri merupakan representasi pertarungan ideologi agama, komunis, nasionalis dan sekularisme, dengan tiga pilihan dasar negara yaitu Pancasila, Sosial Ekonomi, dan Islam (Sukri, 2021). Faksi Islam menghendaki negara berdasar Islam, sedangkan faksi nasionalis menginginkan negara yang tidak berdasarkan agama (Yamin, 1959). Faksi Islam yang diwakili Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin, Isa Anshari, dan KH Masykur, kokoh mempertahankan Islam sebagai dasar negara.

Faksi Islam berprinsip bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan dan alam semesta (Uhlir, 1998). Sedangkan faksi nasionalis berprinsip, agama dan negara harus dipisahkan secara tegas dan proporsional. Fungsi agama menurut faksi nasionalis hanya mengurus ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat dan urusan pribadi saja, sementara negara memang merupakan masalah politik yang berurusan dengan duniawi (Abdillah, 1999). Hanya saja perdebatan itu tidak memberikan catatan yang luas, bagaimana realitas Islam yang berkembang di Indonesia saat itu sangat beragam ekspresinya.

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh mayoritas muslim yang beraliran *ahlu al Sunnah wal jama'ah (sunnī)* (Wahid, 2018). Ragam ekspresi keagamaan di bidang teologi, fikih dan tasawwuf dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya sangat kental nuansa *sunny* (Iqbal, 2014). Sepanjang sejarah masyarakatnya, kontestasi aliran keagamaan terlihat dari penolakan aliran-aliran yang berbeda, misalnya terhadap aliran syi'ah. Oleh sebab itu, melihat seberapa kuat pengaruh dan determinasi teologi sunni dalam pembentukan sejarah Indonesia modern perlu diselidiki lebih dalam. Misalnya, bagaimana signifikansi teologi Islam dalam menentukan gerak dan arah sejarah Indonesia; bagaimana hukum gerak sejarah seperti hukum takdir (fatum), evolusionisme, orang besar, dialektis bekerja dalam membentuk pola gerak sejarah Indonesia. Hukum dan pola gerak sejarah ini memiliki korelasi dengan kecenderungan keberagaman masyarakat Indonesia yang mayoritas mengidentifikasi diri sebagai aliran Sunni.

Di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban. Menurut al-Mawardi, *imamah* (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (*nubuwwah*) untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan

dunia (al-Mawardi, n.d.). Menurut Ibn Taymiah, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi amar ma'ruf nahy munkar, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam dan hak-hak individu terjamin dalam masyarakat (Taimiyah, 1964).

Sementara menurut Imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Oleh sebab itu, kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara adalah aturan berdasarkan kewajiban agama (syar'i). Kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengamalan dan penghayatan agama secara benar (Al Ghazali, 1994). Pendapat para pemikir sunni tersebut dapat dijadikan bukti bahwa aspek teologi merupakan bagian terpenting dalam menentukan arah sejarah masyarakat Islam. Pelibatan tuhan, kenabian dan syari'at Islam merupakan elemen terpenting dalam membentuk sejarah umat Islam. Hal serupa juga terjadi dalam proses sejarah menjadi Indonesia.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara berkuasa, Kitab-kitab klasik seperti Hikayat Raja-raja Pasai, *Taj al-Salathin* dari *Bustan ai-Salathin*, adalah contoh bagaimana doktrin politik Sunni berkembang dalam mendukung kekuasaan raja-raja Nusantara (Iqbal, 2014). Karya-karya tersebut memperlihatkan bagaimana kontinuitas doktrin Sunni tetap terpelihara dalam praktik dan pemikiran politik Islam di Nusantara hingga masa Indonesia berdiri sebagai negara baru. Dalam dokumen resmi pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea ke-3 ditemukan pengakuan tertulis bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan jalinan yang kuat antara "rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dan usaha manusia "dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur." Bagaimana pernyataan itu muncul dapat dibaca melalui pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, sebagai berikut;

Bahwa bangsa Indonesia jang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa jang berperadaban luhur, dan peradabannja itu mempunjai Tuhan Jang Maha Esa. Oleh sebab itu, dengan sendirinja kita insjaf, bahwa Negara Kesedjahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu (RI, 1988).

### **Nalar Teologi Islam-Sunni**

Beberapa informasi di atas menunjukkan adanya keterkaitan elemen teologi dalam konsepsi pemikir sunni berabad-abad lampau dengan gagasan para *founding fathers* Indonesia tentang pembentukan dan arah sejarah masyarakat Indonesia modern. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi kehadiran teologi sunni dalam konteks kajian determinisme historis dalam filsafat sejarah? Beberapa jawaban yang mungkin diberikan antara lain;

Pertama, tidak ada pendapat resmi dari pakar yang beraliran Sunni, yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia atau peristiwa sejarah tertentu adalah perwujudan langsung dari kehendak Tuhan. Meskipun teologi sunni memiliki konsep takdir (*qadar*), yang berarti segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, tetapi bagaimana peristiwa tersebut dipahami dalam konteks sejarah atau nasionalisme bisa bervariasi. Tetapi dalam dokumen resmi pembukaan UUD 1945 telah memberikan penegasan adanya gagasan determinasi teologis, bahwa kemerdekaan dan proses pembentukan masyarakat Indonesia adalah "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa." Begitu juga dengan gagasan tuhan dan agama dalam dasar negara yang ada di

Piagam Jakarta yang diperdebatkan *founding fathers* Indonesia yang telah mengalami proses penguatan status dari semula hanya diakui sebagai dokumen historis dan dokumen hukum menjadi sumber hukum (Saidi, 2007).

Kedua, dokumen lainnya juga menguatkan adanya hukum dialektis ala Hegelian. Proses sejarah kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tetapi adalah hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan banyak faktor, termasuk perjuangan politik, sosial, ekonomi, dan militer, serta peran aktif tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan banyak lainnya. Kemerdekaan Indonesia juga didukung oleh sejumlah faktor sejarah dan perubahan internasional pada saat itu, termasuk setelah Perang Dunia II. Begitu juga rencana masa depan setelah kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia adalah sesuatu yang harus direncanakan dan digerakkan. Pada alinea ke-4 teks Pembukaan UUD 1945 disebutkan ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Dalam konteks teologi Sunni, segala upaya pencapaian kemerdekaan dan upaya mengisi kemerdekaan dengan berbagai agenda membangun kesejahteraan dapat dipandang sebagai tanggungjawab manusia, dan akan menjadi hukum siklus dalam gerak sejarah Indonesia.

Ketiga, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil usaha manusia Indonesia yang sangat besar harganya. Tetapi kehadiran Allah pada alinea ke-3 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang sudah dikukuh sebagai *staatsidee*, tidak boleh dirubah, mengubahnya berarti merubah dasar negara. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan manusia yang selaras dengan kehendak tuhan merupakan pernyataan khas teologi sunny yang amat jelas. Kepercayaan kepada kehendak Allah (iman) mungkin menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak orang Islam yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Tetapi secara universal pandangan ini lebih tepat dikaitkan dengan nasionalisme dan perjuangan manusia Indonesia daripada pandangan teologis tentang kehendak Tuhan. Dalam teologi Sunni, perbuatan manusia meskipun secara hakiki dimiliki oleh Tuhan, tetapi manusia memiliki *kasb* (perolehan/usaha) untuk dapat menggunakan perbuatan itu (Nasution, 1986).

## **Kesimpulan**

Uraian di atas telah menggambarkan pengaruh determinisme teologis dalam membentuk hukum dan pola gerak sejarah Indonesia, sekaligus menggambarkan hubungan yang unik antara agama dan negara. Agama telah menjadi faktor yang menentukan (determinan) dalam pembentukan narasi historiografi Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada *pertama*, perumusan periodisasi sejarah Indonesia yang didasarkan pada fase-fase yang dibangun berdasarkan entitas kekuasaan yang bercirikan agama dan identitas penguasanya yang dikaitkan dengan agama dan keyakinan tertentu, dan *kedua*, juga dapat juga dibaca pada corak historiografi yang berkembang di Indonesia yang bernuansa sejarah agama ditinjau dari segaa aspeknya. Dalam konteks sejarah Indonesia modern, faktor teologi Islam juga terlihat memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk narasi yang terkait dengan hubungan agama dan negara.

Dalam konteks yang lebih spesifik, determinisme teologis juga ikut membentuk tindakan dan percakapan individu dalam kelompok masyarakat muslim Indonesia bila terkait dengan tema-tema agama dan politik.

### Daftar Rujukan

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di persimpangan makna: respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1996-1993)*. (W. Wahab, Trans.) Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, T. (1996). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, T. (1996). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Adam, C. (1988). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. (A. B. Salim, Trans.) Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ali, R. M. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- al-Mawardi, A. a.-H. (t.t.). *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Sharqawi, E. (1981). *Filsafat Kebudayaan Islam*. Bandung: Pustaka.
- Bertland, A. (1994). *Giambattista Vico (1668—1744)*. Retrieved from Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP): [https://iep-utm-edu.translate.google/vico/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://iep-utm-edu.translate.google/vico/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Collingwood, R. (1985). *Idea Sejarah*. Malaysia: Dewan Bahasa.
- Dengel, H. H. (2011). *Darul Islam, NII dan kartosuwiryo: Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Deventer, M. L. (1886-1887). *Geschiedenis der Nederlanders op Java (Vol. 1&2)*. Haarlem: HD Tjeenk Willink. <https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/4772885>
- Endraswara, S. (2017). *Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawaen*. (Saifuddin, Ed.) Yogyakarta: Narasi.
- Engels, F. (n.d.). *Dialektika*. (I. Iramanto, Editor). <https://www.marxists.org/indonesia/archive/marx-engels/1883/dialektika.htm>
- Feinberg, J. S. (2001). *No One Like Him*. Wheaton Illinois: Crossway Books.
- Ferdinandus, S. U. (1995). Arca-Arca Wisnu Di Asia Tenggara (Abad Ke 4-8 M). *Berkala Arkeologi*, 15(3), 185–192. <https://doi.org/10.30883/jba.v15i3.693>
- Ghazali, A. (1994). *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. (t. A. Ismail, Trans.) Bandung: Mizan.
- Haq, M. F. (2018, September 16). *Moeldoko: Jangan Bawa Agama ke Politik-News*. <https://news.detik.com/berita/d-4213838/moeldoko-jangan-bawa-agama-ke-politik>
- Hatta, M. (1977). *Pengertian Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional-Jakarta*. Jakarta: Idayu Press.
- Hatta, M. (1986). *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI-Press.
- Helm, P. (1993). *The Providence of God*. Illinois: InterVarsity Press.

- Hook, S. (1950). *The Hero in History*. New York: Humanities Press.
- Humaidi, A. (2018, October 12). *Berpolitik Jangan Bawa Agama-Humaniora*. <https://www.kompasiana.com/ahumaidisj/5bbfeafa6ddcae7a714130f4/berpolitik-jangan-bawa2-agama-biar-mati-tanpa-agama>
- Indonesia, M. P. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Iqbal, M. (2011). Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 51-65. doi: <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.51-65>
- Iryawan, W. (2017). Historiografi Islam di Indonesia. *Jurnal al-Tsaqafa*, 14(1), 149.
- Jaya, P. B. (2022). *Takdir dan Ketuhanan dalam Aforisme Sehari-hari: Pandangan Nietzsche dan Spinoza*. [https://www.researchgate.net/publication/363336203\\_Takdir\\_dan\\_Ketuhanan\\_dalam\\_Aforisme\\_Sehari-hari\\_Pandangan\\_Nietzsche\\_dan\\_Spinoza](https://www.researchgate.net/publication/363336203_Takdir_dan_Ketuhanan_dalam_Aforisme_Sehari-hari_Pandangan_Nietzsche_dan_Spinoza).
- Joesoef, D. (2004). *Borobudur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ma'arif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara: studi tentang perdebatan konstituante*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Mahfud, M. (2018, Agustus 23). *Universitas Gadjah Mada*. Retrieved from [https://ugm.ac.id/id: https://ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama/](https://ugm.ac.id/id:https://ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama/)
- Maiwan, M. (2013). Kosmologi Sejarah dalam Filsafat Sejarah: Aliran, Teori, dan Perkembangan. *Literasi*, 3(2), 160-170. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/lit/article/view/6126>.
- Merriam--webster. (2023, Oktober 05). *Vox populi vox Dei*. Retrieved from <https://www-merriam--webster-com>.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante*. Jakarta: Pustaka Utama Garafiti.
- Nasution, H. (1985). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandinga*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, H. (1986). *Teologi Islam : Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Oldroyd, D. (1983 ). *Darwinian Impacts*. Kensington: New South Wales University.
- RI, S. N. (1988). *Himpunan risalah sidang-sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (tanggal 18 dan 19 Agustus 1945)*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara RI.
- Rizaty, M. A. (2022, Maret 11). Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022. Retrieved from [dataindonesia.id: https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022](https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022).
- Sahidin, A. T. (2019). *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis*. Jakarta: Kencana.

- Saidi, R. (2007). *Status Piagam Jakarta Tinjauan Hukum dan Sejarah*. Jakarta: maHMILub.
- Siregar, V. H. (2023, May 28). *Jangan Libatkan Agama dalam Urusan Politik, Erman Suparno: Tidak Boleh Ada Politisasi Agama [News]*. Retrieved from inews.id: <https://bekasi.inews.id/read/301811/jangan-libatkan-agama-dalam-urusan-politik-erman-suparno-tidak-boleh-ada-politisasi-agama>
- Sukri, M. A. (2021). Kontektualisasi Pemikiran Politik Jean Jacques Rousseau di Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah*, 13(1), 90-102. <https://doi.org/10.15548/ja.v13i1.2754>
- Susanto, M. D. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia (Jilid I-VI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutherland, H. (2008). Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah. In B. P. Henk Schulte Nordholt (Ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (p. 33). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suwarno, P. J. (1990). *Sejarah Birokrasi: Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Taimiyah, T. I. (1964). *Al-siyasah al-syar'iyah fi ishlah al-ra'iy wa al-ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy.
- Uhlin, A. (1998). *Oposisi berserak: Arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Vicens, L. (2022). *Theological Determinism: New Perspectives*. (P. Furlong, Ed.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Wahid, R. A. (2017). Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1(2), 141-163. <http://dx.doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.
- White, E. G. (1917). *Prophets and Kings*. California: Pasific Press Publishing Association.
- Wood, M. (2013). *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Yamin, M. (2017). *6000 Tahun Sang Merah Putih* (Edisi Kedua (Penyesuaian Ejaan) ed.). (H. Yani, Ed.) Jakarta: Balai Pustaka.
- Zed, M. (2018). Tentang Konsep Berpikir Sejarah. *Lensa Budaya*, 13(1), 54-60. <https://doi.org/10.34050/jlb.v13i1.4147>
- Zuhri, A. M., & Wahyudi, W. E. (2021). Artikulasi Teologi Sunni di Indonesia: Sejarah, Ekspresi dan Gerakannya. *Journal of Islamic Civilization*, 3(2), 122-134. <https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2593>.